



BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan secara holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
  - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
  - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 01 Agustus 2025



Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 01.08.2025

P.j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025 NOMOR 22 SERI E NOMOR 19

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

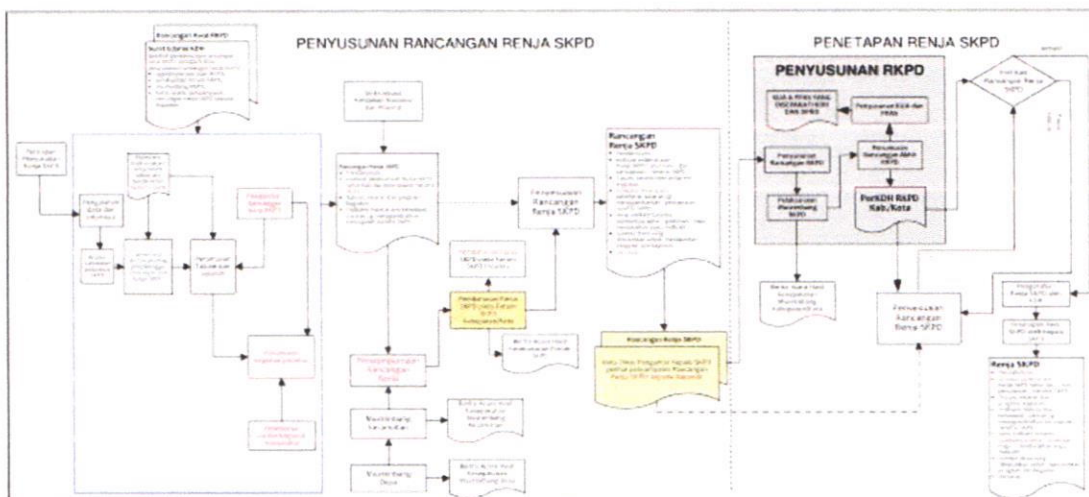
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota**

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
  - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
  - Orientasi mengenai Renja
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
  - Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja
  - Pengolahan data dan informasi
  - Analisis gambaran pelayanan PD
  - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
  - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
  - Telaah terhadap rancangan RKPD
  - Perumusan tujuan dan sasaran
  - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  - Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
  - Penyempurnaan rancangan kerja PD
  - Pembahasan forum PD
  - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
3. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
5. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2026 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Implementasi aplikasi SIPD merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP Kab. Purworejo Tahun 2026**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-2 November 2024
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Minggu ke-1 Desember 2024
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2025
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Minggu ke-1 Maret 2025
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Maret 2025

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Juli 2025
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Juli 2025
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Akhir Juli 2025

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025 – 2029 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo ( lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8 );
17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).

19. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 (seri E nomor 21);
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 9)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2026.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2026.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

##### **BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

##### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renja tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten  
Renja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
Periode Pelaksanaan: Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Rencana Peringkat Daerah pada Tahun 2024 (Abitur Periode Basista)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang disyokkan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/1/10 Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah/1/10 Tahun 2023 14 - 13 / 9 * 100%	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1. Meningkatkan Nilai Investasi	3	Perubahan Nilai Investasi	%	4	1.440.120.049	799.947.900	95.612.246	289.821.226	91.839.384	291.877.296	2.209.270.201	41,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	2. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal	4	Realisasi Penanaman Modal	Miliar	5	5.298.000.000	799.947.900	95.612.246	289.821.226	91.839.384	291.877.296	2.209.270.201	41,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Perubahan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	5	807.000.000	49.811.300	1.680.000	21.682.900	14.033.246	6.972.000	272.326.146	33,77	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Kecepatan dan Kualitas Regulasi Pengembangan iklim Penanaman Modal	Dokumen	5	589.000.000	46.011.500	1.680.000	20.826.400	14.033.246	5.923.400	270.120.966	45,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Perbaikan Fasilitas/Insentif Hibrida Penanaman Modal yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	549.000.000	46.011.500	1.680.000	20.826.400	14.033.246	5.923.400	270.120.966	43,2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Perbaikan Fasilitas/Insentif Hibrida Penanaman Modal yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kepastian Usaha	30	40.000.000								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Perbaikan Fasilitas/Insentif Hibrida Penanaman Modal yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	218.000.000	1.800.000	0	1.806.000	0	1.049.200	2.405.200	1,1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Perbaikan Fasilitas/Insentif Hibrida Penanaman Modal yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	117.000.000								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Perbaikan Fasilitas/Insentif Hibrida Penanaman Modal yang Mendukung Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	101.000.000	3.400.000	0	1.316.000	0	1.049.200	2.405.200	2,36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Program Promosi Penanaman Modal	%	99,5	737.000.000	56.211.700	16.598.030	8.601.993	7.334.527	16.429.416	243.324.087	32,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	99,5	737.000.000	56.211.700	16.598.030	8.601.993	7.334.527	16.429.416	243.324.087	32,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	369.000.000	10.000.000	2.117.000	2.315.000	2.944.000	0	65.880.803	17,8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	387.000.000	46.211.700	14.482.030	6.286.113	4.390.527	16.429.416	177.693.147	45,9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	%	100	1.572.000.000	483.780.945	66.178.667	95.501.661	50.026.975	77.931.101	773.439.349	49,2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Pelayanan dan Non Pelayanan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	1.572.000.000	483.780.945	66.178.667	95.501.661	50.026.975	77.931.101	773.439.349	49,2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	







Pada Tahun 2024, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 3.282.437.296 dari pagu RKPD sebesar 4.129.740.882 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,87 %. Capaian kinerja sebesar angka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal, dikarenakan masih dibawah 90 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Penanaman Modal harus menunggu trasfer dana dari pusat yang tidak tepat waktu, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan;
3. Belanja Perjalanan Dinas untuk kegiatan Fasilitasi dan Harmonisasi Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, sampai Akhir Desember belum terjadwalkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 ( empat puluh empat ) Perizinan yang dilayani yaitu:

<b>NO</b>	<b>NAMA IZIN</b>
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAHRAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG /BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK
27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

<b>NO</b>	<b>NAMA IZIN</b>
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DINPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C. 30.

TABEL T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

No	Indikator	SPM / stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n- 1)	Th. 2027 (thn n)	Th. 2024 (thn n- 1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	7	8		10	12	12	13	
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi		✓	10%	10%		27%	117%	117%		
2	Realisasi Penanaman Modal	✓		81,85M	90M		20 M	105 M	105 M		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88		88	88	88	88	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88		88	88	88	88	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto					26,84					
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					68,52					
8	Realisasi Penanaman Modal					131,03 M					
9	Nilai IKM Perangkat Daerah					96,42					
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					68,52					
11	Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan					100					
12	Jumlah Kepeminatan (LOI)					9					
13	Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM					79					
14	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan					100					
15	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria					100					
16	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					100					

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### **KEKUATAN (S):**

- a. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik;
- b. Adanya Kegiatan Gebyar Perizinan;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
- d. Tersedianya Sistem Purworejo Investment Center (PIC);
- e. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- f. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik.

##### **KELEMAHAN (W):**

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo.

#### 2. Lingkungan Eksternal

##### **PELUANG (O):**

- a. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
- b. Teknologi informasi berkembang pesat;
- c. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
- d. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

##### **ANCAMAN (T):**

- a. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus sendiri perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
- c. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang investasi;

2. Belum optimalnya sinergitas OPD terkait dalam mendukung pengembangan iklim investasi.

#### **2.4 Review terhadap RKPD**

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3

## Reviu terhadap RKPD tahun 2026 Kabupaten Purworejo

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	5 100%	6 2.684.362.151	7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	9 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10 100%	11 2.401.379.700	12
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	17.924.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.427.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	4.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	8.427.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.904.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.015.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.740.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp 000)
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	1.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.375.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		
	Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	1.821.174.251	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.545.902.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.794.274.251	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.520.142.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.000.000	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	23.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	23.400.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.750.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	140.275.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworeja Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	140.275.500	20

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 12 Laporan	5 12 Laporan	6 140.275.500	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 12 Laporan	11 140.275.500	12
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>		<b>542.088.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>588.897.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.859.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.859.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.273.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.082.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	368.955.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368.955.750	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>102.900.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>117.878.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran, dan Pajak Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38.220.000	21

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	36.758.000	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	15000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	15000000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	27.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	27.900.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>5 %</b>	<b>81.893.720</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>5 %</b>	<b>81.893.720</b>	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	20.626.660	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	-	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 %	20.626.660	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			22

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>		<b>Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>61.267.060</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>		<b>Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>81.893.720</b>	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	60.626.660	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	21.267.060	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	21.267.060	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERSENTASE NOMOR INDIK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN</b>	<b>99,50%</b>	<b>277.716.990</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERSENTASE NOMOR INDIK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN</b>	<b>99,50%</b>	<b>277.716.990</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Percentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	277.716.990	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Percentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	277.716.990	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Menagat Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	227.716.990	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	227.716.990	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	In dikator Kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3	4 PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	5 100%	6 313.325.550	7 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	8	9 PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	10 100%	11 373.325.550	12
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	313.325.550	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	373.325.550	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.500.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	212.296.050	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	272.296.050	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berbasris risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	2.500.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berbasris risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	3 Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5 35 Kegiatan Usaha	6 96.029.500	7 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	8 Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 35 Kegiatan Usaha	11 96.029.500	12
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK</b>	<b>100%</b>	<b>798.985.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK</b>	<b>100%</b>	<b>798.985.000</b>	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	798.985.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	798.985.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	119.847.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	119.847.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha	439.443.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha	439.443.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha	239.695.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	11 239.695.000	12
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.684.225	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.683.025	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.684.225	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.683.025	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	85.684.225	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	85.683.025	



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Arah kebijakan nasional bidang Penanaman Modal adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal sektor pangan, infrastruktur, energi dan Green Investment;
4. Membangun kemitraan Penanaman Modal Usaha Besar dengan K-UMKM.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

### **3.2. Telaah Terhadap RPJMN dan RKP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai arah pembangunan pasca RPJMN.

Dalam RPJMN 2020–2024, salah satu agenda prioritas pembangunan nasional adalah peningkatan investasi untuk mendorong transformasi ekonomi. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan perizinan secara elektronik. Selain itu, penguatan kelembagaan DPMPTSP di daerah juga menjadi salah satu strategi kunci dalam mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing daerah.

Selaras dengan hal tersebut, Rancangan RKP Tahun 2026 yang disusun dalam konteks awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045, mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rancangan tersebut, investasi tetap menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan investasi swasta, baik domestik maupun asing, melalui percepatan kemudahan berusaha, penguatan pelayanan terpadu satu pintu, serta pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan.

Bagi Kabupaten Purworejo, kebijakan ini menjadi pijakan strategis untuk mengarahkan program dan kegiatan DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan investasi lokal. Terlebih, Kabupaten Purworejo memiliki potensi strategis yang terus dikembangkan, termasuk sektor industri kecil dan menengah, pariwisata, dan pertanian. Maka dari itu, peran DPMPTSP menjadi sangat penting sebagai fasilitator utama dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan efisien, sekaligus menjadi ujung tombak dalam promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Dengan demikian, penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 diharapkan dapat merespons secara konkret arah kebijakan nasional tersebut, dengan menyusun program dan kegiatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong iklim investasi daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan penanaman modal		Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,84
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,52
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Realisasi Penanaman Modal	131,03
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	96,42
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,52

### 3.4. Program dan Kegiatan

Penentuan Program dan Kegiatan ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
4. Isu strategis perangkat daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah merumuskan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Perumusan program dan kegiatan ini didasarkan pada pertimbangan strategis, termasuk kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, pemenuhan indikator pembangunan daerah, serta keterkaitan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi perencanaan dan penganggaran, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Seluruh program dan kegiatan disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Adapun program dan kegiatan beserta sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagai berikut :

No	Kode	Usulan / Bidang Usulan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA RENJA OPD Tahun 2024	Praktikan Capaian Tungg RENCANA OPD Tahun 2025	Target 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kategori Sasaran	Praktikan Misi Rencana Tahun 2027		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2															
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
1	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Pelaksanaan Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %			100 %	4.124.617.026 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	15	4.771.971.841 0		17	
								4.124.617.026 0					4.771.971.841 0			
								3.468.986.066 0					2.804.215.541 0			
2	2 18 01 2 01	Pencetakan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencetakan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Dokumen	4.816.000 0			Aparatur		9.427.200 0			
2	2 18 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Pencetakan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah				22 Dokumen	4.816.000 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		9.427.200 0			
2	2 18 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			1 Laporan	2.625.788.840 0			Aparatur		2.024.256.756 0			
2	2 18 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.625.788.840 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		2.024.256.756 0			
2	2 18 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			3 Dokumen	121.603.871 0			Aparatur		165.134.750 0			
2	2 18 01 2 06 0005	Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pakar, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.702.400 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		0 0			
2	2 18 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	14.327.475 0	Kab. Purwokerto, Purwokerto Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		23.859.250 0			
2	2 18 01 2 06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	103.573.796 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		141.275.500 0			
2	2 18 01 2 06	Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah				24 Laporan	605.277.585 0			Aparatur		608.518.835 0			
2	2 18 01 2 06 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	196.849.065 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		196.081.085 0			
2	2 18 01 2 06 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.428.500 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		410.437.750 0			
2	2 18 01 2 06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	111.500.000 0			Aparatur		126.878.000 0			
2	2 18 01 2 06 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pengajuknya				1 Unit	39.850.000 0	Kab. Purwokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur		40.220.000 0			
2	2 18 01 2 06 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2026 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan**

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

**1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

**2. Program Promosi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

**3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.

Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

**4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan

penanaman modal.

#### 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan.

Rencana program dan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 4.1

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026**

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.444.081.095	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	112.183.530	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	156.041.700	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	173.013.400	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	219.685.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	22.237.300	
			<b>4.127.242.025</b>	

#### 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, DPMPTSP Kabupaten Purworejo menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan Program Strategis Nasional, Prioritas Nasional, serta Program Unggulan Daerah. Pada tingkat nasional, program yang didukung adalah Kemudahan Perizinan Daerah, yang diimplementasikan di Kabupaten Purworejo melalui dua program utama, yaitu: Program Pelayanan Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Aktivitas pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2026 hingga periode 2026–2030 meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online maupun offline (MPP dan jemput bola), serta penyediaan data perizinan dan non perizinan. Bidang urusan yang menaungi program tersebut adalah Penanaman Modal dengan perangkat daerah pelaksana DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Tabel

h

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional disajikan pada tabel 4.2.1

Tabel 4.2.1 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026	Bidang Urusan
1	Kemudahan perizinan daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara online maupun offline (MPP dan jemput bola)	Penanaman Modal
2		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penyediaan data perizinan dan non perizinan	Penanaman Modal

Selain mendukung program strategis nasional, DPMPTSP Kabupaten Purworejo juga berperan dalam mendukung Prioritas Nasional 5 dan 7. Pada Prioritas Nasional 5, dukungan diwujudkan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan berupa pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyediaan peta potensi dan peluang usaha daerah, sehingga dapat memperkuat promosi investasi dan menarik minat investor. Program ini diarahkan untuk memperluas akses informasi peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, pada Prioritas Nasional 7 yang berfokus pada transformasi digital layanan publik, dukungan diberikan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Sub kegiatan meliputi penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dengan dukungan pada Prioritas Nasional 5 dan 7 ini, DPMPTSP Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk memperkuat iklim investasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, sehingga mampu memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pelaku usaha. Tabel Dukungan terhadap Prioritas Utama Nasional disajikan pada tabel 4.2.2

Tabel 4.2.1 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan
1	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	<b>Program :</b> Pengembangan Iklim Penanaman Modal <b>Kegiatan :</b> Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota <b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penanaman Modal
2	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	<b>Program:</b> Program Pelayanan Penanaman Modal <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota <b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal

DPMPTSP Kabupaten Purworejo juga melaksanakan Program Unggulan Daerah **“Rame Pasare”** yang berorientasi pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kegiatan pada tahun 2026 meliputi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, sosialisasi iklim investasi, partisipasi dan penyelenggaraan kegiatan temu usaha, pelayanan perizinan penanaman modal, penyusunan IPRO, serta penyediaan data perizinan dan non perizinan. Pada periode 2026–2030, kegiatan tersebut dilanjutkan dan diperkuat dengan pelaksanaan evaluasi RUPM, peningkatan sosialisasi iklim investasi, serta optimalisasi pelayanan perizinan. Tabel Dukungan terhadap Program Unggulan Daerah disajikan pada tabel 4.2.3

Tabel 4.2.3 Dukungan terhadap Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	Bidang Urusan
1	Rame Pasare	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (2026) 2. Sosialisasi Iklim Investasi 3. Mengikuti kegiatan temu usaha di luar daerah 4. Penyelenggarakan temu usaha 5. Pelayanan perizinan penanaman modal 6. Pelayanan non perizinan penanaman modal 7. Penyusunan IPRO 8. Penyediaan data perizinan dan nonperizinan	Penanaman Modal

Dengan demikian, dukungan program DPMPTSP Kabupaten Purworejo selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan promosi potensi daerah, serta mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital.

#### 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berikut indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada tahun 2026

Tabel 4.3 Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</b>			
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,84
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,52
3.	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	131,027976
4.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	96,42
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah</b>			
1	Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	%	100
2	Jumlah Kepeminatan (LOI)	Angka	9
3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM	Angka	79
4	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	%	100
5	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100
6	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100

Tabel indikator kinerja di atas menggambarkan ukuran capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo tahun 2026, yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat lima indikator strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal, yaitu:

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan target 26,84%, yang mencerminkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi ukuran sejauh mana kegiatan penanaman modal mampu mendorong peningkatan aset tetap di Kabupaten Purworejo.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 68,52, sebagai indikator akuntabilitas dan kinerja organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Realisasi Penanaman Modal dengan target Rp131,03 miliar, yang menjadi indikator utama dalam mengukur daya tarik investasi serta keberhasilan strategi promosi dan fasilitasi investasi daerah.

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 96,42, sebagai gambaran kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas layanan yang diterima masyarakat maupun pelaku usaha.
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah kembali ditargetkan pada angka 68,52, yang menegaskan pentingnya konsistensi dalam peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai ukuran operasional yang lebih teknis dalam mendukung pencapaian IKU. Beberapa indikator kunci yang ditetapkan antara lain:

1. Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan dengan target 100%, yang menunjukkan keterbukaan informasi sebagai sarana promosi investasi.
2. Jumlah Kepeminatan (LOI) dengan target 9, yang mengindikasikan minat investor terhadap peluang usaha di Kabupaten Purworejo.
3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM dengan target 79, yang menggambarkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan realisasi investasi.
4. Persentase data dan informasi perizinan maupun non perizinan yang disediakan dengan target 100%, sebagai wujud transparansi pelayanan publik.
5. Persentase pelayanan penanaman modal sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dengan target 100%, yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku.
6. Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan target 100%, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kelancaran fungsi pemerintahan daerah.

Berdasarkan indikator tersebut, arah kinerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 tidak hanya terfokus pada peningkatan nilai investasi semata, tetapi juga menekankan pada aspek akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, kepatuhan regulasi, serta keterbukaan informasi. Dengan demikian, target yang ditetapkan akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya tarik daerah, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun seoptimal mungkin dengan mempedomani :

1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 antara lain:

- a. Penyusunan RUPM pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat kegiatan untuk mendukung promosi penanaman modal guna menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten purworejo;
- c. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan dimana kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.

2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 pada akhir tahun 2026;

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

